

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah saat ini, kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu sorotan publik. Karena, rakyat menuntut pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Fitra, 2016).

Kinerja pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah

daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik (Prasatya dan Suartana, 2017).

Partisipasi penyusunan anggaran memiliki kaitan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Susilowati, 2016). Partisipasi dalam penyusunan anggaran pada dasarnya yang terjadi di pemerintah daerah terlaksana dengan baik, dimana dalam penyusunan anggaran pemimpin selalu melibatkan bawahan, sukses atau tidak sebuah kegiatan yang turut andil adalah bawahan karena mereka yang lebih mengetahui program pelaksanaan kegiatan pada umumnya (Asrini, 2017).

Menurut Cemerlang (2016) partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik atau tahunan. Dari partisipasi anggaran dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah akan meningkat apabila partisipasi anggaran diterapkan didalamnya.

Sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Pituringih dan Widiastuty, 2015). Kejelasan tujuan anggaran juga akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-

target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan menimbulkan kinerja pemerintah daerah (Fitra, 2016).

Selain partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran juga sangat penting untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran kedepartemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen, dalam pelaksanaan APBD setiap SKPD melakukan evaluasi untuk menilai kinerjanya masing-masing, apakah kinerjanya sesuai dengan apa yang direncanakan atau sebaliknya untuk itu suatu anggaran harus selalu dievaluasi agar nantinya APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (Haslinda, 2016). Menurut Antara dan Rini (2017) evaluasi anggaran merupakan penyimpangan yang baru diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya sehingga dapat diketahui kinerja yang telah dicapai oleh pelaksanaan anggaran di dalam pemerintah daerah.

Akuntabilitas juga memiliki kaitan erat dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Menurut (Mbon, 2014) akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Saputra dkk, (2014) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang

menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja maka pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen dan metode pengumpulan data kinerja.

Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengukuran kinerja pemerintah daerah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintah sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan kinerja yang terbaik (Wiguna dkk, 2015).

Menurut (Riswanto, 2016) berpendapat bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

Sekretariat Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang, yang didalamnya juga tercantum penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang.

Peraturan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memuat bagaimana struktur organisasi perangkat daerah dibuat, dimana jumlah besarnya sesuai dengan kebutuhan kemampuan daerah. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah meliputi :

1. Proses perencanaan
2. Pelayanan
3. monitoring
4. Evaluasi pelaporan serta
5. Pelayanan administrasi

Tabel 1.1
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Daerah Kota
Palembang

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	92.265,814.834, 74	72.923.294.311,00	79,03 %
2017	100.275.718.965	94.462.382.717	94,20%
2018	139.767.607.907,23	126.413.394.161,00	90,45 %

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas Realisasi dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2016 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 mengalami kenaikan dari 79.03% menjadi 94,20% sedangkan pada Tahun 2018 Realisasi dan Capaian kinerja menurun dari 94,20% menjadi 90,45 % pada Tahun 2018.

Fenomena yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu terkait dengan kejelasan sasaran anggarannya. Didalam pelaksanaan kejelasan sasaran anggaran, Sekretariat Daerah Kota Palembang telah menyusun program kegiatan dengan jelas dan spesifik namun didalam implementasinya program yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil dan perincian program kegiatan masih belum sesuai dengan realisasi. Kurang jelasnya sasaran anggaran mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Sehingga

kualitas pelayanan tidak optimal dalam memberikan pelayanan yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian tersebut dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH “(Studi Empiris Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Ruang Lingkup Peneliiian

Untuk memperjelas dan memudahkan analisa pembahasan penelitian ini, maka dapat dilihat ruang lingkup dari penelitian yang akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris, pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah,
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris, pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris, pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah daerah

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah

3. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti yang ingin meneliti hal yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian secara sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, berikut batasan-batasan yang ditentukan serta saran-saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang untuk penelitian yang sama.